

MEMO HUKUM

HUKUM PERBANKAN

MIRANDA

**USAHA BANK TANPA IZIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1690.K/Pd/1993)**



KK.

Pid. 700/96

*Mir
u*

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

**USAHA BANK TANPA IZIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992**

(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1890.K/PII/1993)



MEMO HUKUM

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Woerjaningsih, S.H., MS.

NIP. 130 517 141

Penulis,

Miranda

NIM. 039313663


Telah diuji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 12 Juli 1996.

Tim Penguji :

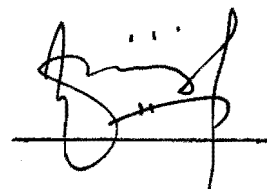
1. Ketua : Muchammad Zaidun, S.H.
NIP. 130517145



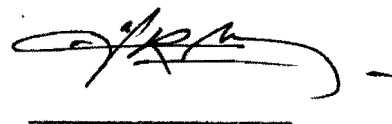
2. Sekretaris : Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.
NIP. 130317798



3. Anggota : Woerianingsih, S.H., MS.
NIP. 130517141



Made Darma Weda, S.H., MS.
NIP. 131801632



bentuk petunjuk, nasihat, bimbingan, pengarahan serta pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Tindakan berupa pengawasan oleh aparat pemerintah daerah atau birokrat bekerjasama dengan aparat keamanan untuk memantau perusahaan-perusahaan dengantujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan SIUP yang telah diberikan merupakan usaha atau tindakan represif untuk mencegah adanya praktik bank tanpa izin.

V. Kesimpulan dan Saran.

1. Kesimpulan.

- a. Apabila suatu perbuatan telah dilakukan dan kemudian terjadi perubahan perundang-undangan maka dapat digunakan pasal 1 ayat (2) KUHP. Berbeda halnya kalau perubahan perundang-undangan tersebut terkait dengan suatu perbuatan yang berlanjut yang diatur pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dalam kasus yang dibahas dapat diterapkan pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai ketentuan pidana terhadap perbuatan praktik bank tanpa izin.
- b. Usaha preventif maupun represif merupakan wewenang dari Bank Indonesia dalam membina serta melakukan pengawasan terhadap keberadaan bank-bank yang ada di Indonesia.

2. Saran.

- a. Bagi masyarakat yang memiliki dana lebih, jangan mudah tergiur oleh tingginya suku bunga yang tidak wajar. Pemberian bunga yang tidak wajar dalam perbankan merupakan hal yang tidak pernah dilakukan oleh pihak bank.
- b. Kerjasama antara pihak Bank Indonesia, Polri serta Kejaksaan perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan dan penindakan terhadap praktik bank tanpa izin yang ada di dalam masyarakat.

24